

Optimalisasi Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara

Muhammad Mirwan

Abstrak

Muhammad Mirwan, Optimalisasi Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah bimbingan, Drs. Endang Erawan, M.Si dan Dini Zulfiani, S.Sos

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, studi lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh Gambaran secara keseluruhan bahwa Optimalisasi Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kota Bangun sudah berjalan dengan baik dan camat bertanggungjawab atas segala program yang ada di kecamatan kota bangun dengan cara melihat fakta – fakta yang ada di lapangan.

Kata Kunci : Optimalisasi, Koordinasi, Kecamatan.

Pendahuluan

Latar Belakang

Sebagai negara kesatuan yang sedang berkembang, indonesia melaksanakan berbagai pembangunan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat yang sejalan dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Hakikat pembangunan nasional bangsa Indoneisa adalah mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembangunan

nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah ataupun kepuasan batiniah saja melainkan juga keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang mencakup seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perkembangan tersebut dilaksanakan secara terarah dan terpadu dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam isi pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV, yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional juga dilaksanakan di semua aspek kehidupan berbangsa yaitu meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya pembangunan rakyat harus memperoleh manfaat dari hasil pembangunan tersebut.

Pembangunan itu dilaksanakan secara merata seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya ditujukan untuk golongan tertentu atau sebagian masyarakat saja, akan tetapi pembangunan nasional tersebut ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu keterpaduan, keserasian, dan keselarasan gerak dalam tindakan dari seluruh unsur aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk tercapainya keterpaduan tersebut maka diperlukan suatu koordinasi. Dalam pelaksanaan koordinasi ini tidak hanya dilaksanakan pada tingkatan tertentu saja tetapi mencakup seluruh tingkatan, mulai dari pusat sampai ke kelurahan dan/atau desa yaitu mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, hingga pada Pemerintah Kelurahan/Desa

Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana Optimalisasi Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara?
- 1) Apa saja yang menjadi faktor penghambat Optimalisasi Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ?

Tujuan Penelitian

- 2) Untuk mengetahui Optimalisasi Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Untuk mengetahui faktor penghambat Optimalisasi Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen

Menurut Mary Parker Follet dalam buku T. Hani Handoko (2003) menyatakan bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Optimalisasi

Menurut Badudu (1994:964), mengartikan “Optimal sebagai perolehan hasil yang baik haruslah melalui suatu usaha. menurut Poerwodarminta (1990:687), menyatakan bahwa optimal adalah “Kondisi tertinggi atau terbaik yang paling menguntungkan dengan kondisi fisik yang ada”.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata optimalisasi berasal dari kata optimum yang berarti tertinggi atau maksimum dan setelah mendapatkan tambahan kata yang dibelakangnya yakni dari optimum menjadi optimalisasi maka mempunyai arti yaitu suatu usaha untuk meningkatkan, menambah, memperbaiki dan membuat menjadi lebih bagus atau sempurna yang dilakukan semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan.

Koordinasi

Pengertian Koordinasi.

Menurut Manila (1996:43), bahwa : “Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen, dengan kata lain dalam koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan”. Pelaksanaan koordinasi pemerintahan di kecamatan melekat pada Kepala Kecamatan sebagai pemegang wewenang dan berkewajiban melaksanakan koordinasi terhadap seluruh Instansi Vertikal dan Dinas Daerah di wilayahnya. Oleh karena itu, Camat perlu melakukan upaya-upaya dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan di wilayahnya agar kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasayarakatan dapat berjalan sesuai dengan program yang direncanakan.

Menurut Siagian dalam Moekijat (1996:6), memberi pengertian koordinasi yaitu :“Pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Dan merupakan suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin”.

Menurut Kaloh (2002:157), pengertian koordinasi adalah: “Pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama”. Dari pengertian tersebut, dapat diperinci unsur-unsur koordinasi sebagai berikut :

1. Koordinasi mengandung arti sebagai suatu proses atau kegiatan secara terus menerus tidak pernah berhenti;
2. Mengandung upaya atau kegiatan untuk menyerahkan, menyelaraskan, atau mensinkronisasikan unit-unit atau bagian atau tindakan di dalam suatu organisasi; dan
3. Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih.

Koordinasi Pemerintahan.

Menurut Poelje yang dikutip Syafrudin (1993:67), menyatakan bahwa : “Masalah kerja sama antara aparat pemerintah dan pertaliannya satu sama lain, merupakan masalah koordinasi pemerintahan yang sangat penting dan besar artinya”

Menurut Manila (1996:41) mengemukakan ciri-ciri koordinasi sebagai berikut :

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan.
2. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama.
3. Koordinasi adalah proses yang terus menerus.
4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur.
5. Koordinasi adalah konsep kesatuan tindakan bersama.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah merupakan pembahasan suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Dalam penelitian ini penulis menguraikan definisi konsepsional yang menyangkut judul skripsi agar mempermudah dalam memahami maksud pembahasan lain. Definisi konsepsional dari penelitian ini adalah: optimalisasi koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan.

Optimalisasi koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan ialah suatu usaha untuk memadukan kerjasama dan keterkaitan antara pemerintah kecamatan dan instansi-instansi yang ada di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara melakukan rapat koordinasi antara lembaga yang terkait, mengsosialisasikan tujuan kegiatan atau proyek, dan melakukan pemantauan dan pengawasan secara bersama, dalam rangka meningkatkan kontribusi masing-masing instansi secara maksimal di dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan bersama.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang dilakukan adalah kantor Kecamatan Kota Bangun

Fokus Penelitian

1. Koordinasi vertikal berupa Koordinasi antara Camat, pegawai kecamatan yang meliputi :
 - a. Rapat Koordinasi
 - b. Melaporkan segala kebijakan yang di putuskan
 - c. Menyampaikan secara berkala laporan tertulis kepada pimpinan atau kepala wilayah (camat)
 - d. Mensosialisasikan tujuan kepada para anggota
 - e. Atasan atau pimpinan harus sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan
2. Koordinasi Horisontal berupa koordinasi antara camat terhadap kepala Kepolisian, Korem, PT. Muzilienz dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Bangun yang meliputi :
 - a. Rapat Koordinasi antara lembaga
 - b. Konsultasi antara kepala intansi atau lembaga
 - c. Mensosialisasikan tujuan kegiatan dan proyek
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara bersama
 - e. Antara lembaga saling memberikan informasi
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Optimalisasi Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Observasi

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
 2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
 3. Penyajian data (*Data Display*)
- Penarikan kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan bentuk atau format judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang bersifat Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2003: 2) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Menurut Moleong (2001: 90) penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang – orang, latar dan perilaku secara *holistik* (utuh). Dengan demikian jenis penelitian didalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif

Hasil Penelitian

Koordinasi Vertikal Berupa Koordinasi Antara Camat Terhadap Pegawai Kecamatan.

1.Rapat Koordinasi

Secara umum, rapat koordinasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengatur dan menyelaraskan setiap pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama oleh beberapa orang atau badan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Dengan kata lain, rapat koordinasi merupakan penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama dan mengupayakan pengeluaran seimbang dengan sumber keuangan, perlengkapan, dan alat-alat dengan kebutuhan produksi, persediaan dengan angka pemakaian, penjualan dengan produksi, dan seterusnya.

Untuk menyelaraskan kegiatan antara unit yang satu dengan unit yang lain perlu dilakukan suatu koordinasi. Kurangnya pengertian, pemahaman, serta dukungan dalam pelaksanaan koordinasi dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan dan saling tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Sebaliknya, apabila koordinasi terlaksana dengan baik akan dapat menciptakan keharmonisan dan kerja sama yang baik. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi vertikal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

2.Melaporkan Segala Kebijakan Yang di Putuskan

Pengambilan kebijakan merupakan serangkaian proses kegiatan yang diorientasikan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang diharapkan berdasarkan atas pertimbangan akal sehat manusia selain itu fungsi kebijakan adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program - program pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan.

Ketika bicara tentang kebijakan (*policy*), sering tertukar pengertiannya dengan kebijaksanaan (*wisdom*), padahal kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sangat berbeda. Landasan utama kebijakan adalah pertimbangan akal, sedangkan kebijaksanaan lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional tentu saja pengambilan suatu kebijakan tidak semata-mata didasarkan oleh pertimbangan akal manusia semata, tetapi akal harus menjadi faktor dominan ketika seseorang akan mengambil suatu kebijakan. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi vertikal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

3. Menyampaikan Secara Berkala Laporan Tertulis Kepada Pimpinan atau Kepala Wilayah (camat)

Berdasarkan prinsip tahap awal, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses manajerial. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Jika koordinasi selalu dilakukan di awal maka semua fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling* dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan proses koordinasi yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh pihak instansi maupun cabang – cabang dinas yang lainnya agar dapat menyelenggarakan tugas – tugas pemerintah dengan sebaik – baiknya maka harus menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan, hal ini di lakukan agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan dapat di Kontrol oleh camat selaku penanggungjawab pemerintah di kecamatan. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi vertikal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

4. Mensosialisasikan Tujuan Kepada Para Anggota

Pelaksanaan koordinasi antara camat dengan instansi lainya terdapat adanya hubungan antara koordinator dengan pihak yang dikoordinasikan, dalam hal ini yang menjadi koordinator adalah camat kota bangun dan yang dikoordinasi adalah pihak instansi yang terkait. Salah satu hubungan kerja sama yang dilaksanakan ialah mensosialisasikan tujuan kepada para anggota.

Peranannya sebagai fungsi yang mengintegrasikan seluruh prosesorganisasi maka koordinasi perlu dilakukan dalam setiap tahapan proses manajemen. Hal ini diperlukan karena setiap tahapan proses manajemen tentumemerlukan keterpaduan peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, koordinasi dianggap sebagai salah satu kunci sukses dalam proses manajemen.

Dalam mensosialisasikan tujuan camat selaku koordinator di wilayah kecamatan kota bangun agar sasaran dari pembangunan yang ada di kecamatan kota bangun dapat tercapai, dengan mensosialisasikan tujuan kepada para anggota di harapkan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan kota bangun dapat

berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi vertikal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

5. Atasan atau Pimpinan Harus Sering Melakukan Komunikasi Informasi Dengan Para Bawahan.

Komunikasi informasi adalah suatu proses yang mempunyai arti dan nilai bagi penerima informasi agar bisa di mengerti atau dipahami, dalam kegiatan yang berupa percakapan yang dipakai dan apa bila informasi yang dikirim atau diterima itu berupa tulisan, maka komunikasinya adalah komunikasi tertulis, terkadang komunikasi berlangsung dalam bentuk tanda – tanda atau gerakan – gerakan anggota tubuh.

Terkadang komunikasi informasi umumnya untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan atau mengomunikasikan dan menyebarkan informasi kepada orang yang dianggap perlu menerima informasi tersebut.

proses koordinasi dapat berjalan dengan baik karena adanya komunikasi langsung antara anggota organisasi. Seluruh manajer harus mampu berkomunikasi langsung dengan baik dengan bawahannya sehingga tercipta hubungan yang baik. Kontak langsung ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, salah penafsiran, dan perselisihan antara manajer dan anggota organisasi lainnya. Dengan demikian manajer dapat mengkoordinasi berbagai aktivitas anggotanya secara efektif dan efisien. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi vertikal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

Koordinasi Horisontal Berupa Koordinasi Antara Camat Terhadap Kepala Kepolisian, Korem, PT. Muzilienz dan UPTD Dinas.

Pelaksanaan koordinasi antara camat dengan para kepala instansi Horisontal dan cabang dinas telah sering dilaksanakan dengan tujuan agar terjalin suatu hubungan kerja sama dan komunikasi yan baik agar pelaksanaan koordinasi di kecamatan kota bangun dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini sebagai pihak yang dikoordinasi pemerintahan yang dilakukan anatara, kapolsek, koramil maupun Instansi dinas yang terkait agar mempunyai peran yang cukup penting dalam penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi horisontal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

1. Rapat Koordinasi Antara Lembaga

Terdapat beragam bentuk koordinasi. Beberapa diantara bentuk koordinasi yang dapat diaplikasikan dalam organisasi publik adalah bentuk koordinasi dengan pendekatan proses manajemen, bentuk koordinasi dengan pendekatan mekanisme pasar, bentuk koordinasi dengan pendekatan organisasi,

bentuk koordinasi dengan pendekatan hubungan antar struktur dan bentuk koordinasi dengan pendekatan partisipasi masyarakat.

Rapat koordinasi di lakukan hampir setiap bulan, biasanya rapat di lakukan pada tanggal 28 dan apabila ada hal – hal yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan sehingga terkadang tidak di jadwalkan terlebih dahulu, misalnya rapat tentang razia miras.

Rapat koordinasi dilaksanakan hamper setiap minggunya, biasanya rapat koordinasi bertujuan untuk menevaluasi program Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang dilaksanakan seminggu sebelumnya dan pembahasan program yang akan dilaksanakan dan biasanya di hadiri oleh camat, kepala desa maupun instansi yang terkait.

Selain itu juga rapat koordinasi biasanyan dilakukan untuk mengadakan konsultasi atas pelaksanaan program – program pemberantasan buta aksara dan program paket C dan D yang dilaksanakan oleh kecamatan kota bangun, dan disamping itu juga bertujuan untuk membina hubungan kerja. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi horisontal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

2.Konsultasi Antara Kepala Instansi Atau Lembaga

Dalam pelaksanaan koordinasi, camat menjalin hubungan kerja dengan unsur Instansi, koramil dan kepolisian. Dalam mengembangkan hubungan yang baik, salah satu ciri kepemimpinan yang demokratis adalah suka menerima masukan berupa saran, kritik, dan pendapat dari orang lain yang di pimpinnya.

Untuk sementara ini konsultasi antara camat dengan kapolsek kecamatan Kota Bangun sudah berjalan dengan baik, biasanya konsultasi itu dalam hal keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya yang ada di kecamatan kota bangun, disamping itu juga biasanya konsultasi dilakukan setiap ada masalah yang menyangkut keamanan

Koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan kota bangun yang bersifat rutin berupa rapat – rapat formal, juga dilakukan koordinasi yang bersifat non formal dengan kepala instansi dengan maksud melakukan konsultasi atas pelaksanaan program kegiatan yang akan dan sedang berjalan. Pelaksanaan koordinasi yang berbentuk konsultasi antara camat dan instansi terkait telah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dalam pelaksanaannya. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi horisontal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

3.Mensosialisasikan Tujuan Kegiatan dan Proyek

Dalam mensosialisasikan tujuan dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu atau keadaan yang menyangkut daya dan upaya yang dilakukan dengan cara langsung berhubungan dengan objek atau sasaran di lapangan. Keberhasilan pembangunan atau suatu program tidak lepas dari keberhasilan camat dalam berkordinasi seta dukungan dari instansi lainnya.

Dalam pelaksanaannya, penyampaian program, inisiatif, dan gagasan kepada instansi – instansi yang terkait di lakukan oleh camat selaku kepala pemerintahan tingkat kecamatan, mensosialisasikan tujuan kegiatan dan proyek diharapkan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan kota bangun dapat berjalan sesuai dengan tujuanyang diharapkan.

Pihak kecamatan maupun pihak instansi yang lainnya selalu mensosialisasikan tujuan dan proyek ada di kecamatan kota bangun ini, biasanya penyampaian itu di lakukan ketika ada rapat koordinasi antara camat dan instansi – instasi yang lainnya. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi horisontal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

4.Melakukan Pemantauan dan Pengawasana Secara Bersama

Kepemimpinan yang efektif memastikan koordinasi baik pada tahap perencanaan dan eksekusi. Seorang pemimpin yang baik dapat membimbing kegiatan bawahannya ke arah yang benar dan dapat menginspirasi mereka untuk menarik bersama dalam pemenuhan tujuan bersama. Kepemimpinan suara dapat membujuk bawahan untuk memiliki identitas bunga dan mengadopsi pandangan umum. Pengawasan pribadi merupakan metode penting untuk menyelesaikan perbedaan pendapat.

Pengawasan merupakan mekanisme koordinasi dimana masing-masing divisi/unit organisasi disupervisi/diawasi/dikontrol secara ketatoleh atasannya dalam rangka memaksimalkan *benefit* kesuksesan organisasi. Dalam hal ini proses koordinasi berjalan melalui mekanisme penetapan target, pengawasan pencapaian target dan pelaporan pencapaian target.

Untuk menyelaraskan kegiatan antara unit yang satu dengan unit yang lainnya perlu perlu dilakukan suatu koordinasi, dengan adanya koordinasi yang baik antara aparatur pemerintah, diharapkan mencapai tujuan pemerintah secara keseluruhan akan terjamin guna mencapai keserasian, keselarasan, dan keterpaduan baik dalam hal pemantauan maupun pengawasan, jadi dengan pemantauan dan pengawasan langsung maka di harapkan dapat mencapai dayaguna dan hasil guna yang besar. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi horisontal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

5.Antara Lembaga Saling Memberikan Informasi

Koordinasi dapat dilakukan dengan baik dengan adanya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik harus diterapkan pada semua departemen dalam organisasi, antara para pekerja, maupun manajer dengan bawahannya. Semua penghalang dan jarak dalam berkomunikasi sebisa mungkin harus dihindari dan dibenahi. Komunikasi yang baik membantu mengurangi kesalahpahaman sehingga koordinasi dapat berlangsung dengan baik.

Memberikan informasi antara lembaga yang ada di kecamatan kota bangun amatlah mutlak, terlebih bagi lembaga instansi – instansi yang ada di

kecamatan kota bangun, dengan saling memberikan informasi terhadap lembaga lainnya di harapkan dapat menjalin kerja sama yang baik pula.

Dengan demikian maka segala sesuatu yang menyangkut dalam kegiatan program maupun proyek – proyek yang ada di kecamatan kota bangun akan berjalan dengan baik, hal itu di karenakan adanya komunikasi antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi horisontal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

Faktor Penghambat Optimalisasi Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam setiap pelaksanaan koordinasi yang ada di Kecamatan Kota Bangun baik yang vertikal maupun horisontal, meskipun metode dan mekanisme dari pelaksanaan koordinasi tersebut telah diatur dengan baik, namun selalu saja ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Camat dalam Pelaksanaan Koordinasi dijelaskan sebagai berikut. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi vertikal dan horisontal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

1. Teknis Administratif

Teknis administratif menyangkut pengaturan cara penyusunan organisasi dan tatacara kerja dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan ketentuan umum, secara administratif instansi – instansi dan cabang dinas di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan informasi yang di sampaikan oleh Camat Kota Bangun bahwa kurangnya tingkat kematangan teknik administrasi kecamatan terhadap pelaksanaan koordinasi disebabkan oleh karena masih terjadinya perumusan tugas, wewenang dan tanggungjawab antara unit kerja yang kurang jelas, masing – masing pejabat dan unit pemerintah belum memahami sistem, prosedur dan mekanisme koordinasi itu sendiri, serta kurangnya kemampuan dari masing – masing pimpinan instansi dan cabang dinas yang ada di kecamatan kota bangun untuk menjalankan koordinasi. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi vertikal dan horisontal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

2. Teknis Operasional

Teknis operasional dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu atau keadaan yang menyangkut daya dan upaya yang dilakukan dengan secara langsung berhubungan dengan objek atau sasaran yang ada di lapangan. Hal ini berdasarkan dengan struktur pemerintahan secara berjenjang dari pusat sampai kedaerah bahwa teknis operasional instansi vertikal maupun horisontal dan cabang dinas daerah berada dibawah koordinasi Camat.

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh informasi bahwa teknik operasional yang dijalankan oleh instansi dan cabang dinas berjalan kurang baik, hal ini disebabkan karena penyelenggaraan dari rapat – rapat koordinasi yang tidak merumuskan suatu keputusan yang final karena terbatasnya biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan forum – forum dan rapat – rapat koordinasi baik yang berasal dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah daerah. (Hal ini berdasarkan rapat koordinasi oleh camat kota bangun terhadap instansi vertikal dan horisontal yang di pimpin oleh bapak Drs. Mawardi)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Vertikal

1. Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Kota Bangun dinilai baik artinya koordinasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Melaporkan segala kebijakan yang diputuskan pemerintah di Kecamatan Kota Bangun pada umumnya sudah berjalan dengan baik, adapun unsur yang terkandung didalam upaya koordinasi tersebut meliputi pelaksanaan tugas camat, penyampaian program kepada instansi – instansi dan pembagian tugas oleh camat.
3. Menyampaikan secara berkala laporan tertulis kepada pimpinan atau kepala wilayah (camat), dinilai baik karena berhasilnya pelaksanaan koordinasi yang tidak lepas dari dukungan aparat kecamatan, instansi vertikal maupun horizontal dan cabang dinas serta komponen masyarakat Kecamatan Kota Bangun.
4. Mensosialisasikan tujuan kepada para anggota, camat selaku penanggungjawab pemerintah kecamatan telah melakukan sebagai mana mestinya, tetapi ada juga pensosialisasian di lakukan dengan cara memberikan pengumuman melalui surat edaran maupun melalui pengeras suara pada hari jumat, hal itu bertujuan agar seluruh masyarakat yang hadir bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lainnya.
5. Atasan atau pimpinan harus sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan, yang dilakukan oleh camat kota bangun terhadap pegawainya, kalau dilihat sudah cukup baik, karena camat selalu berkomunikasi dengan baik terhadap pegawainya.

b. Horisontal

1. Rapat koordinasi antara lembaga, yang ada di Kecamatan Kota Bangun di lakukan oleh para unsur muspika, yaitu Camat, Danramil, PT. Muzilienz dan Kepolisian Kecamatan Kota Bangun.

2. Konsultasi antara kepala instansi atau lembaga, pelaksanaan koordinasi yang berbentuk konsultasi antara camat dan instansi terkait telah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dalam pelaksanaannya.
3. Mensosialisasikan tujuan kegiatan dan proyek, bahwa tidak semua proyek yang di sosialisasikan oleh instansi – instansi yang ada di kecamatan Kota Bangun, hal itu di karenakan keterbatasan waktu yang tidak mendukung untuk di sosialisasikan.
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara bersama, dapat di ketahui bahwa tidak semua instansi – instansi yang terlibat di dalam pemantauan dan pengawasan kegiatan proyek – proyek yang ada di kecamatan kota bangun, kecuali diminta oleh camat untuk turun bersama – sama kelapangan dan melihat langsung kegiatan proyek.
5. Antara lembaga saling memberikan informasi, dapat di ketahui bahwa di dalam menyampaikan informasi instansi – instansi yang terkait belum sepenuhnya di lakukan oleh pihak kecamatan, hal itu disebabkan masih terjadi perumusan tugas, wewenang dan tanggungjawab antar unit kerja yang ada di kecamatan kota bangun.

Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Koordinasi di wilayah Kecamatan Kota Bangun antara Camat dengan kepala instansi vertikal serta cabang dinas hendaknya dioptimalkan lagi, melalui pelaksanaan rapat koordianasi secara rutin dan hubungan kerja yang harmonis.
2. Camat mengawasi koordinasi pegawai dikantor terhadap staf, hendaklah meningkatkan teknik kematangan administrasi, teknis oprasional dan menghimbau para Instansi untuk lebih memahami kemampuan melalui koordinasi.
3. Camat dalam melakukan koordinasi lebih mengutamakan komunikasi yang bersifat timbal balik untuk menciptakan kesatuan bahasa dan kerja sama sehingga koordinasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
4. Dalam melakukan suatu permasalahan baik sebelum atau sesudah koordinasi yang berkaitan dengan instansi internal maka instansi tersebut harus melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi eksternal.
5. Pemberitahuan tentang rapat koordinasi sebelumnya diberitahukan beberapa hari sebelum dilaksanakan rapat koordinasi.

Daftar Pustaka

Anwar, Sidqul, 1999, Teknik-Teknik Koordinasi dalam Organisasi Publik/Pemerintahan, <http://www.scribd.com/doc/31352694/Teknik-Teknik->

Koordinasi-Dalam-Organisasi-Publik-Pemerintahan, Diakses Selasa 3 September 2012.

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Proses Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta; Jakarta

Badudu. J.S, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan; Jakarta

Handyaningrat, Soewarno, 1996, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT Toko Agung; Jakarta

Hasibuan, SP, Malayu, 1996, *Manajemen Dasar, Pengantar dan Masalah*, CV Mas Agung; Jakarta

Kaloh, J., 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta; Jakarta

Manila, I. G. K., 1996, *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*, PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta

Moekijat, 1994, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Mandar Maju; Bandung

Musa, Muhammad dan Titi Nurfitri, 1998, *Metodologi Penelitian*, Fajar Agung; Jakarta
Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta; Bandung

Suradinata, Ermaya, 1997, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*, Gramedia; Jakarta

Sutanto, 1988, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gajah Mada; Yogyakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 1992, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Syafruddin, Ateng, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito; Bandung